

Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka

Adriana Alesandra Da Cunha¹; Henrikus Herdi²; Pipiet Niken Aurelia³

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Alamat: Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

E-mail: adrianadacunha82@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine and analyze financial performance using the value for money method of the Sikka Regency Regional Financial and Asset Management Agency. This type of research is descriptive quantitative. The data used is secondary data. Data collection techniques using literature and documentation. The data analysis used is quantitative analysis using the value for money method based on three elements, namely economy, efficiency and effectiveness. The results of the study show that the financial performance of the Sikka Regency Regional Financial and Asset Management Agency for the 2019-2021 fiscal year, when viewed from an economic level, is categorized as economical because the economic ratio level is less than 100%. Judging from the level of efficiency, the 2019-2021 fiscal year is categorized as efficient because the efficiency ratio is less than 100%. In terms of the level of effectiveness for the 2019 and 2021 fiscal years, they are categorized as ineffective because the effectiveness ratio is less than 100% and 2020 is categorized as effective because the effectiveness ratio is more than 100%.*

Keywords: *Value for money, Economical, Efficient, Effectiveness*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan metode *value for money* berdasarkan tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021 jika dilihat dari tingkat ekonomis dikategorikan ekonomis dikarenakan tingkat rasio ekonomisnya kurang dari 100%. Ditinjau dari tingkat efisiensi tahun anggaran 2019- 2021 dikategorikan efisien dikarenakan rasio efisiensinya kurang dari 100%. Ditinjau dari tingkat efektivitas tahun anggaran 2019 dan 2021 dikategorikan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100% dan tahun 2020 dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya lebih dari 100%.

Kata kunci : *Value for money, Ekonomis, Efisien, Efektivitas*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat seiring dilaksanakannya otonomi daerah. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hak otonomi kepada masing-masing daerah atau kabupaten akan memberikan kebebasan untuk mengolah dan meningkatkan sumber pendapatannya, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut. Semakin tinggi realisasi pendapatan yang dicapai, hendaknya dapat mencerminkan semakin baik kinerja pemerintah daerah sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk lebih berpikir kritis terhadap kinerja pemerintah daerah, dibutuhkannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana uang publik tersebut digunakan, tetapi juga meliputi kemampuan memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik.

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Menurut Syamsi (1986) dalam Mulyaningtyas (2018) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan untuk menggali dan mengolah sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya agar tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Sehingga mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam perencanaan pembangunan bagi pemerintah daerah. Dari perencanaan pembangunan ini pemerintah daerah berupaya melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD. Pengelolaan APBD yang baik harus memperhatikan kepentingan publik maka realisasi dan pengalokasian dana terhadap program-program maupun berbagai kegiatan yang dibiayai akan memberikan manfaat yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Akan tetapi dalam

perkembangannya masih terdapat permasalahan dalam sistem pengelolaan terhadap APBD.

Untuk itu laporan APBD perlu di evaluasi optimaslisasinya terhadap alokasi anggaran apakah telah berjalan secara ekonomis, efektif dan efisiensi (*value for money*) demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. maka diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya.

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas, (Mardiasmo 2016:4) Ekonomis berarti perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi berarti pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu, Semakin rendah nilai rasio efisiensi yang di peroleh, maka semakin bagus pula kinerja organisasi sektor publik tersebut. Dan elemen yang terakhir dari konsep *value for money* yaitu efektifitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Prinsip *value for money* dalam rangka pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpuh pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik serta, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2016:98).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka, bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan dan aset daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat masalah yang dikutip dari KOMPAS.com Tim Kejaksaan Negeri Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah kantor BPKAD Kabupaten Sikka, Rabu (20/7/2022) yakni ruang bidang Akuntansi, Anggaran, Perbendaharaan,

Sekretariat, untuk mencari dokumen asli terkait dugaan kasus korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) penanganan bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2021. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dugaan korupsi senilai Rp 900.000.000 lebih.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Subhan *et al.*, (2020) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi APBD Kabupaten Sumbawa) memberikan hasil bahwa kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa jika dilihat dari perekonomian pada tahun anggaran 2010 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Indrayani & Khairunnisa (2019) dengan judul Analisis Kinerja Dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe periode 2014-2016) memberikan hasil bahwa rasio ekonomi dikategorikan ekonomis, rasio efisiensi dikategorikan efisien dan rasio efektifitas memperoleh kriteria tidak efisien. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahmawati (2019) dengan judul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* memberikan hasil bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo tercatat memiliki rasio ekonomis yang tidak stabil namun tetap ekonomis, tingkat efisiensi yang baik dengan angka tidak mencapai 100% dan efektifitasnya mencapai lebih dari 100%.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu perbedaan lokasi dan terdapat masalah terkait dugaan korupsi yang dikutip dari KOMPAS.com. Berdasarkan permasalahan di atas serta hasil dari penelitian terdahulu yang memberikan hasil yang berbeda maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka”.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Grand theory yang mendasari teori ini adalah *stewardship theory* (Donaldson dan David, 199:147) dalam Miranti Dewi (2018) yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat

diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan. Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Value For Money

Menurut Mardiasmo (2016:4) *Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektifitas. Ekonomis: perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis merupakan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi: pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Indrayani & Khairunnisa, 2019).

Anggaran

Menurut Mulyadi (2010:24) anggaran merupakan suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam jangka waktu setahun, sedangkan menurut Mahmudi (2016:59) anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan di setujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang di sebut Peraturan Daerah (Badrudin, 2012) dalam Herdi *et.al* (2020) Tahun anggaran

APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:147), penelitian deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu didalam suatu penelitian menurut Sugiyono (2013:173). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 - 2021.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling* dengan memilih Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD Tahun 2019 – 2021.

Teknik Analisis Data yang digunakan adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan rasio ekonomis, efisien dan efektifitas.

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data tersebut berupa: Laporan APBD dan Laporan Realisasi APBD periode Tahun 2019- 2021.
2. Mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

- 1.) Menghitung Nilai Rasio Ekonomis

Menurut Mardiasmo (2016:4), ekonomis adalah perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga terendah. Ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Menurut Mahmudi (2016:21), Ekonomis merupakan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam kegiatan operasional.

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input : Realisasi Anggaran Belanja

Input Value : Target Anggaran Belanja

Menurut Mahsum (2006), kriteria ekonomis adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, ekonomis.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, ekonomis berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka tidak ekonomis.

2.) Menghitung Nilai Rasio Efisiensi

Menurut Bastian (2017:76), efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Menurut Mahmudi (2016:21), pencapaian *output* yang maksimal dengan menggunakan *input* yang paling terendah.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Output : Realisasi Anggaran Belanja

Input : Realisasi Anggaran Pendapatan

Menurut Mahsum (2006), kriteria efisien adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, efisien.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efisien berimbang
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, tidak efisien.

3.) Menghitung Nilai Rasio Efektifitas

Menurut Bastian (2017:16), efektifitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2016:21) Efektifitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan :

Outcome : Realisasi Anggaran Pendapatan

Output : Target Anggaran Pendapatan

Menurut Mahsum (2006), kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) maka, tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka, efektivitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka, efektif.

3. Melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Hasil perhitungan tingkat ekonomis

Perhitungan tingkat ekonomis berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021.

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019- 2021

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	Rp.1.069.925.718.327,95	Rp. 995.918.011.826,74	93,08
2020	Rp. 935.722.970.947,57	Rp. 906.023.956.510,77	96,83
2021	Rp.1.429.447.735.632,24	Rp.1.112.256.100.953,75	77,81

(sumber data : BPKAD tahun 2022)

Berdasarkan tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja diatas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis Tahun 2019} = \frac{995.918.011.826,74}{1.069.925.718.327,95} \times 100\% = 93,08\%$$

$$\text{Ekonomis Tahun 2020} = \frac{906.023.956.510,77}{935.722.970.947,57} \times 100\% = 96,83\%$$

$$\text{Ekonomi Tahun 2021} = \frac{1.112.256.100.953,75}{1.429.447.735.632,24} \times 100\% = 77,81\%$$

2. Hasil perhitungan tingkat efisien

Perhitungan tingkat efisiensi berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021.

Tabel 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	%
2019	Rp.1.239.199.874.138,26	Rp. 995.918.011.826,74	80,36%
2020	Rp.1.102.491.657.749,49	Rp. 906.023.956.510,77	82,17%
2021	Rp.1.122.667.568.386,52	Rp.1.112.256.100.953,75	99,07%

(sumber data : BPKAD tahun 2022)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diatas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efisien Tahun 2019} = \frac{995.918.011.826,74}{1.239.199.874.138,26} \times 100\% = 80,36\%$$

$$\text{Efisien Tahun 2020} = \frac{906.023.956.510,77}{1.102.491.657.749,49} \times 100\% = 82,17\%$$

$$\text{Efisien Tahun 2021} = \frac{1.112.256.100.953,75}{1.122.667.568.386,52} \times 100\% = 99,07\%$$

3. Hasil perhitungan tingkat efektivitas

Perhitungan tingkat efektivitas berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021.

Tabel laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019- 2021

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	
2019	Rp.1.245.735.000.000,00	Rp.1.239.199.874.138,26	99,48
2020	Rp.1.093.800.000.000,00	Rp.1.102.491.657.749,49	100,79
2021	Rp.1.180.340.000.000,00	Rp.1.122.667.568.386,52	95,11

(sumber data : BPKAD tahun 2022)

Berdasarkan tabel Realisasi Anggaran Pendapatan diatas, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Tahun 2019} = \frac{1.239.199.874.138,26}{1.245.735.000.000,00} \times 100\% = 99,48\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{1.102.491.657.749,49}{1.093.800.000.000,00} \times 100\% = 100,79\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{1.122.667.568.386,52}{1.180.340.000.000,00} \times 100\% = 95,11\%$$

PEMBAHASAN

Tingkat Ekonomis

Berdasarkan perhitungan kinerja keuangan menggunakan tingkat ekonomis menunjukkan bahwa tahun 2019 rasio perhitungan sebesar 93,08% dengan kriteria ekonomis, tahun 2020 rasio perhitungan meningkat sebesar 96,83% dengan kriteria ekonomis sedangkan tahun 2021 rasio perhitungan menurun sebesar 77,81% dengan kriteria ekonomis. Semakin besar rasio ekonomis maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Ini menunjukkan bahwa penganggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dikatakan ekonomis karena dari tahun 2019- 2021 nilai perbandingannya kurang dari 100%.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat ekonomis selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 berada pada kriteria ekonomis. Kriteria ekonomis menunjukkan kinerja yang baik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. Konsep ekonomis terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan dan operasional organisasi. Hal ini didasari dengan teori *stewardship* dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan- tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan David, 199: 147).

Tingkat Efisien

Berdasarkan perhitungan kinerja dengan menggunakan tingkat efisiensi menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi tergolong efisien. Dengan tingkat pencapaian ditahun 2019 sebesar 80,36% dengan kriteria efisien, tahun 2020 perhitungan rasio sebesar 82,17% dengan kriteria efisien dan tahun 2021 perhitungan rasio sebesar 99,07% dengan kriteria efisien.

Keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan target anggaran belanja sesuai dengan target yang ditetapkan, kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target anggaran belanja lebih besar dari realisasi anggaran pendapatan yang diterima.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dengan metode *value for money* pada tingkat efisien yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat efisiensi selama tahun 2019 sampai 2021 berada pada kriteria efisien.

Tingkat Efektivitas

Berdasarkan perhitungan kinerja menggunakan tingkat efektivitas menunjukkan bahwa penganggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka pada tahun 2019 dikatakan tidak efektif rasio perhitungan sebesar 99,48%, tahun 2020 rasio perhitungan sebesar 100,79% dengan kriteria efektif karena rasio perhitungannya melebihi 100%. Untuk di tahun 2021 rasio perhitungan sebesar 95,11% dengan kriteria tidak efektif.

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dengan menggunakan metode *value for money* didasarkan tingkat efektivitas yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa realisasi program yang diukur dari tingkat efektivitas selama tahun 2019- 2021 berada pada kriteria tidak efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2019- 2021 pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dengan menggunakan metode *value for money*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat ekonomis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka tahun anggaran 2019 sampai dengan 2021 dikategorikan ekonomis karena nilai perbandingannya kurang dari 100% dengan rata- rata perhitungan tingkat ekonomis sebesar 89,24% berada pada kriteria ekonomis. Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran pemerintah sudah seminimal mungkin dalam merealisasikan anggaran untuk program/kegiatan yang ingin dicapai.
2. Tingkat efisiensi untuk realisasi anggaran tahun 2019 berada pada kriteria efisien karena nilai perbandingannya kurang dari 100% dengan rata- rata perhitungan tingkat efisien sebesar 87,2% berada pada kriteria efisien. Ini menunjukkan bahwa

Pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang diperlukan dengan minimum untuk mencapai target yang maksimum.

3. Tingkat efektivitas kinerja keuangan pada tahun 2019 dikategorikan tidak efektif karena perhitungan rasio sebesar 99,47%, tahun 2020 perhitungan rasio sebesar 100,79% dengan kriteria efektif, dan di tahun 2021 perhitungan rasio sebesar 95,11% dengan kriteria tidak efektif. Diperoleh rata-rata perhitungan tingkat efisien sebesar 98,46% berada pada kriteria tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa program/kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya maka sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka dalam pengelolaan keuangan daerah dan untuk peneliti selanjutnya.

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka diharapkan bisa melakukan evaluasi Kembali program/kegiatan yang dilaksanakan agar bisa mencapai target dan memperoleh pencapaian kinerja dari program/kegiatan pada target yang telah ditetapkan serta bisa memenuhi kategori dalam *value for money*. Dalam rasio ekonomis, BPKAD Kabupaten Sikka diharapkan lebih meningkatkan lagi dalam melakukan penghematan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif atau mengurangi biaya yang tidak diperlukan dalam mencapai program/kegiatan yang ingin dicapai. Dalam rasio efisiensi, BPKAD Kabupaten Sikka diharapkan harus lebih memperhatikan pengendalian dan perencanaan dari realisasi anggaran belanja. Dalam rasio efektif diharapkan dapat memperhatikan serta meningkatkan kinerjanya sehingga dapat terciptanya pengelolaan pemerintah yang baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan penelitian yang serupa dan peneliti selanjutnya juga diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sehingga penelitian dapat dilakukan dengan lebih baik. Untuk keakuratan data

peneliti menggunakan data sekunder yang telah tersedia dan terpublikasi serta didukung dengan wawancara kepada pihak yang lebih kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul., & Muhammad. (2012). *Teori dan Konsep Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Aurelia. P. N., Dilliana. S. M., Lamawitak. P. L., Sanga. K. P. 2022. Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud pada Perumda Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Vol 1(3), 119-127,2022.
- Bastian, I. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Herdi, Henrikus., Rangga. Y. D. Purnama., Rengga, Andreas., & Goo, E. E. Kutu. 2020. Penetapan Jumlah Anggaran Dengan Menggunakan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Pemerintah Kabupaten Sikka. *Bilancia: jurnal ilmiah akuntansi*. Vol. 4 (2), 202-210, 2020
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Keempat). Salemba Empat.
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. PT. Bumi Aksara.
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Konsep Value for Money Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe: (Studi Kasus Pada Dpkad Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i1.1820>
- Mahbengi, S. (2017). *Analisis Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Merah*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revi). UII Yogyakarta.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keti). UPP STIM YKPN.
- Mahsum, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Cetakan Pe). Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Mahsum, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BFFE.
- Mardiasmo. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo. (2016b). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Miranti Dewi, N. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Other Thesis*.

- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi* (Edisi Keem). Salemba Empat.
- Mulyaningtyas. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan Value for Money. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 1–14.
- Nurlan, D. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah* (PT Indeks).
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 33 Tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan APBD
- Polii, I. R. A., Saerang, D. P. E., Tangkuman, S. J., Polii, I. R. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 781–788.
- Purwiyanti, D. (2017). Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigrasi Donggala Kodi. *Katalogis*, 5(3), 190–200.
- Rahmawati, S. I. (2019). Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8, 1–16.
- Romario. F. D., Rangga.Y. D. Purnama., Erlin, Yohana. 2023. Pengaruh Kinerja Pegawai dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*. Vol 1(2), 45-53, 2023.
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 261–271. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>.
- Sanga. K. P., & Dince. M. N. 2022. Pengaruh Partisipasi Pengguna Kemampuan Teknik Personal, Program Pelatihan dan Pendidikan dan Dukungan manajemen Puncak Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Credit Union (CU) Bahtera Sejahtera. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. vol. 6(2), 9357-9365, 2022.
- Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis Value for Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 8 No.12, 1–16.
- Subhan, P., Ismawati, I., & MiElmiati, N. (2020). Analisis Pengukuran Kinerja

Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Apbd Kabupaten Sumbawa). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2), 78–87.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta CV.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Alfabeta CV.

Sya'diyah, K., Susanti, W., & Rasyidi, A. (2016). Analisis Value For Money dalam Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi "Equity,"* 2, 9–20.

Undang- Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wahyuni, S., Sartika, D., & Mulyani, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Metode Value For Money (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 326–334. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.501>